

HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian secara Filsafat)

Nia Karniawati

(Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom)

e-mail: nkarniawati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan *epistemologi*, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh.

Kata kunci: ilmu pemerintahan, filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi.

ABSTRACT

There are differences from the experts about what is, object, and study of governmental science. In general, governmental science recognized as a study that learning government relationships with the governed. It will be answered Philosophy. To seen governmental science through ontology, epistemology, and axiology principles, it is will be obtained substance of governmental science integrally.

Keyword: governmental science, philosophy, ontology, epistemology, axiology.

PENDAHULUAN

Kajian secara filsafat pada dasarnya ingin menjawab hakekat dari ilmu itu sendiri. Kajian ilmu secara filsafat terbagi atas landasan ontologi, landasan epistemology, dan landasan aksiologi. Landasan ontologi akan menjawab objek apa yang ditelaah

oleh ilmu. Ini akan menjawab bagaimana wujud hakiki dan objek, bagaimana hubungan antara objek dan daya nalar manusia yang membuahkan pengetahuan. Landasan epistemologi akan menjawab bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Landasan aksiologi akan menjawab apa manfaat dari ilmu yang dimaksud.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Garna¹, filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik adalah untuk mengkaji hakekat ilmu, karena itu ilmu adalah cabang ilmu

pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Lebih lanjut Garna menjelaskan bahwa filsafat ilmu adalah telaahan tentang ilmu secara filsafat yang ingin menjawab pertanyaan tentang hakekat ilmu, sebagai berikut :

Tabel 1
Objek dan Landasan Telaah Ilmu

<p>Objek apa yang ditelaah ilmu.</p> <p>Landasan ontologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana wujud hakiki ilmu itu • Bagaimana hubungan antara obyek dengan daya tangkap <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Landasan ontologi atau nalar, manusia yang membuahkan pengetahuan landasan ontologi (yaitu berfikir, merasa, mengindera)
<p>Bagaimana proses memungkinkan ditimba pengetahuan yang berupa ilmu</p> <p>Landasan epistemologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana prosedurnya • Hal apa yang diperhatikan memperoleh pengetahuan yang benar <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang disebut kebenaran • Apa kriteria kebenaran itu • Cara, tehnik, sarana apa yang membantu memperoleh pengetahuan itu yang disebut ilmu
<p>Untuk apa pengetahuan berupa ilmu digunakan</p> <p>Landasan aksiologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaitan cara penggunaan ilmu dengan kaidah moral • Bagaimana penentuan obyek menurut pilihan moral <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kaitan tehnik prosedural atau operasionalisasi metoda ilmiah dengan norma moral atau profesional

(Sumber: dalam Garna, 2010.)

1 Lihat Garna. 2010. Filsafat Ilmu. Primaco Akedemika: Bandung.

Garna juga menjelaskan bahwa untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dengan yang lain maka perlu diajukan pertanyaan apa yang dikaji ilmu pengetahuan itu (ontologi), bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu (epistemologi) dan untuk apa pengetahuan itu digunakan (aksiologi). Jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut akan dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan dalam kehidupan manusia (agama, seni, dan ilmu) dan meletakkan pengetahuan tersebut pada tempatnya.

PEMBAHASAN

Landasan Ontologi

Ilmu Pemerintahan

Landasan Ontologi merupakan wujud hakiki, kahekat dari objek yang diamati/dikaji/ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian Ilmu Pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek forma dari Ilmu Pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan Ilmu Pemerintahan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan definisi tentang Ilmu Pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu-ilmu kenegaraan

seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, dan lain-lain.

Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek forma Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana² adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (*subject matter*). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (*focus of interest*) suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Selanjutnya ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan (yang terdiri dari Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara) ditinjau dari objek material dan objek formanya. Persamaan dari ilmu-ilmu

2 Lihat Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.

kenegaraan tersebut terletak pada objek materianya, yaitu Negara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek forma-nya. Objek forma dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Objek forma dari Ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma dari Ilmu Hukum Tata Negara adalah peraturan perundang-undangan. Objek forma dari Ilmu Negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal Abad XX dengan nama *bestuurswetenschap* (artinya sama dengan Ilmu Pemerintahan) dan *bestuurskunde* (artinya sama dengan seni pemerintah)³. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, seperti memiliki objek kajian, memiliki metodologi yang ilmiah, sistematis, dan universal. Dikatakan sebagai seni karena ada juga pemimpin pemerintahan/orang-orang yang berada dalam pemerintahan yang tidak mempunyai latar-belakang

pendidikan pemerintahan. Mereka ternyata mampu menjalankan roda pemerintahan. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai “seni”.

Di tahun 1970, dalam perkembangannya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu-Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan Ilmu Pemerintahan Terapan sama dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Menurut DGA Van Poelje⁴, ‘*de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt*’. Maksudnya, Ilmu Pemerintahan

3 Lihat Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara: Jakarta. Hal. 160

4 DGA Poelje. 1953. *Algemene inleiding tot de bestuurskunde*. Alphen aan den Rijn: Samson NV. Hal.1.

mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian ini maka objek formanya adalah organisasi/kepemimpinan.

MacIver⁵ merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu *focus of interest*.

Bayu Suryaningrat⁶ mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pen-

dapat ini, maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.

Musanef⁷ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.

TaliziduhuNdaha⁸ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Inu Kencana Syafie⁹ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat

5 Dalam Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.

6 Bayu Suryaningrat.1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47.

7 Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 7.

8 Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. Hal 7.

9 Inu Kencana S. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.

dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah fungsi, hubungan hubungan pemerintahan.

Secara gamblang Ndraha¹⁰ mengemukakan ontologi Ilmu Pemerintahan menggunakan konstruksi pemikiran berdasarkan meta disiplin (*basic flatform*), sehingga *common flatform* dari berbagai disiplin ilmu itu ditemukan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (hubungan pemerintahan).

Van Ylst¹¹ mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

a) Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan

legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b) Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Landasan Epistemologi

Ilmu Pemerintahan

Epistemologi merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Mengkaji Ilmu Pemerintahan secara epistemologi dapat dilakukan melalui perkembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri.

Ilmu Pemerintahan seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha¹² dimana Ilmu Pemerintahan (*bestuur-swetenschap*) mengalami beberapa tahapan perkembangan. Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada dimasa itu sehingga objek itu menjadi ruang-lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin lain. Seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.

Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan.

10 Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta.

11 Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.

12 Taliziduhu Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara: Jakarta. Hal. 9-13.

Misalnya ketika sosiologi mempelajari gejala pemerintahan maka lahirlah sosiologi pemerintahan. Sosiologi pemerintahan ini merupakan spesialisasi sosiologi. Tahap ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan (*body of knowledge*) yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik tadi. Maka lahirlah disiplin Ilmu Pemerintahan elektis. Ilmu Pemerintahan pada tahap awal seperti *bestuurskunde*, bersifat ideografik-elektis. Inilah awal Ilmu Pemerintahan generasi pertama. Pada tahap keempat, lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai *bestuurswetenschap*. Ilmu Pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru (khusus) diantara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalisis. Pada tahap kelima, muncul kemampuan denominatif dari Ilmu Pemerintahan. Ketika metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan oleh ilmu lain sebagaimana Ilmu Pemerintahan menggunakan metodologi ilmu lain pada saat Ilmu Pemerintahan dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah (jurusan pada tingkat S1 atau BKU pada tingkat S2) dan jika Ilmu Pemerintahan diakui sebagai disiplin berderajat akademik tertinggi (S3) dan jika Ilmu Pemerintahan dapat diterapkan didalam kehi-

dupan sehari-hari oleh para profesional pemerintahan yang terhimpun di dalam suatu asosiasi profesional. Ilmu Pemerintahan generasi ketiga ini di Barat telah berkembang.

Pada tahap keenam, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan (tahap kedua), misalnya sosiologi pemerintahan, berkembang sedemikian pesat sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk Ilmu Pemerintahan generasi keempat (*bestuurswetenschappen*) dengan pendekatan multidisiplin dan lintas-disiplin. Pada tahap ketujuh, *bestuurswetenschappen* itu jika berhasil menduduki posisi denominatif, bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Misalnya dengan menggunakan metodologi sosiologi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologis. Maka lahirlah disiplin baru seperti Ilmu Pemerintahan sosiologikal dan seterusnya. Pada gilirannya disiplin ini membentuk Ilmu Pemerintahan generasi kelima.

Ndraha¹³ juga menjelaskan bahwa epistemologi Ilmu Pemerintahan itu mengembangkan konsep hubungan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin (*concept analyses and construction*), multidisiplin (memandang suatu konsep/

13 Lihat Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta.

masalah dari berbagai aspek).

Van Ylst¹⁴ mengemukakan pengkajian secara epistemologi terhadap Ilmu Pemerintahan adalah upaya yang perlu dilakukan dengan seksama dan kritik untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Keberadaan Ilmu Pemerintahan yang tidak jelas ruang-lingkup dan objeknya, telah berlangsung lama jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu politik. Ada keraguan terhadap eksistensi Ilmu Pemerintahan sehingga banyak yang beranggapan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Ilmu Pemerintahan dianggap kurang berperan dan tidak signifikan jika dibandingkan dengan ilmu politik, khususnya peran kontribusi ilmunya terhadap kegiatan pemerintahan.

Menurutnya, kelahiran Ilmu Pemerintahan di Indonesia lebih didasarkan pada minat dan objek penyelidikan *field of study* yang sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga dapat dikatakan kelahiran ilmu-ilmu politik termasuk Ilmu Pemerintahan ini sangat dipaksakan kehadirannya, sehubungan dengan perkembangan sosial politik yang cepat serta membutuhkan tenaga yang kompeten dibidang itu. Dalam keadaan terpaksa inilah, timbullah upaya perintisan

yang dilakukan oleh bidang ilmu pengetahuan lain serta yang lebih mapan keadaannya, seperti ilmu hukum. Antara kurun waktu 1945-1965, hampir semua sarjana hukum di Indonesia terpanggil untuk memulai, menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu politik. Jadi ilmu politik lahir dari kepentingan dan kabutuhan hukum di Indonesia. Pada saat itu politik menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum menjadi mitos yang menyebabkan ilmu hukum tidak berdaya untuk menghadapi realitas politik. Ilmu hukum memerlukan ilmu politik sebagai upaya untuk menghadapi realitas politik guna melandasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Indonesia memiliki organisasi profesi ilmiah di bidang ilmu politik yang menjadi wadah dari ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Pemerintahan. Organisasi itu bernama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang berdiri pada tanggal 17 Januari 1985 di Jakarta. Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik yang diwariskan oleh keadaan anomali pada masa awal kemerdekaan, memberikan banyak ketidakjelasan menyangkut keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dengan ruang-lingkup bahasannya.

Kemudian Van Ylst¹⁵ mengemukakan perkembangan ilmu-ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan di

14 Lihat Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal. 165-168.

15 Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal. 165-168.

Indonesia dalam 3 periode berikut ini:

Tabel 2
Perkembangan Ilmu Pemerintahan

PERIODE		
1945–1965	1965–1985	1985–2005
Ilmu politik dilahirkan oleh para ahli ilmu hukum dan menjadi bagian dari fakultas hukum.	UGM menjadi model pendidikan ilmu politik di Indonesia.	Jumlah universitas yang menjadi model pendidikan ilmu politik bertambah.
Para pengajar berasal dari berbagai disiplin dan kalangan praktisi serta tokoh-tokoh masyarakat.	Para pengajar di daerah sebagian besar dari UGM.	Jumlah ahli ilmu politik bertambah, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Para pegawai pemerintah-an di pusat dan daerah banyak diisi oleh bangsawan Jawa dan partai politik.	Para pegawai pemerintah di pusat dan daerah banyak diisi oleh alumnus UGM.	Para pegawai pemerintahan di pusat dan daerah diisi oleh alumnus dari berbagai universitas, baik dalam dan luar negeri.
Politik dan pemerintah-an diajarkan sebagai pelengkap kurikulum ilmu hukum.	Masing-masing universitas memiliki kurikulum sendiri.	Kurikulum nasional lahir sebagai standar pendidikan ilmu politik dan pemerintah-an.
Berdasar-kan minat dan kepenting-an.	Sarjana dan praktisi dari berbagai kalangan ikut memberikan pemikiran tentang politik.	Terbentuknya komunitas para ilmuan politik dan pemerintahan.
Tidak ada media dan organisasi profesi dalam ilmu politik.	Hasil penelitian dan tulisan tentang politik yang dibuat oleh masing-masing individu dan kelompok.	Memiliki jurnal ilmiah sendiri.

Landasan Aksiologi Ilmu Pemerintahan

Landasan aksiologi adalah manfaat/guna/fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan aksiologi Ilmu Pemerintahan merupakan manfaat/guna/fungsi dari Ilmu Pemerintahan itu sendiri.

Ndraha¹⁶ mengemukakan fungsi Ilmu Pemerintahan dengan melihat fungsi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Fred N. Kerlinger. Ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai dua fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antargejala, menguji pengetahuan lain dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Ke dalam, ia berfungsi sebagai alat untuk menguji dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bersifat *heuristic*, artinya menemukan, menguji, mengoreksi dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus-menerus mampu berfungsi. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka ilmu yang bersangkutan masih lemah (tidak didukung oleh cukup fakta yang konsisiten dan relevan) atau ketinggalan jaman (tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi atau mengantisipasi keadaan, karena zaman sudah berubah) atau tidak *appropriate* (andaikata ilmu diibaratkan alat, maka busi mati tidak bisa dengan kunci inggris).

Ilmu Pemerintahan (yang merupakan ilmu pengetahuan) memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli dalam memberikan pengertian dan sejarah tentang Ilmu Pemerintahan. Ada yang mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan bukanlah ilmu baru. Ilmu Pemerintahan telah ada pada awal Abad XX tepatnya di tahun 1841 dimana Clinton Roosevelt menulis buku yang di dalamnya terdapat Ilmu Pemerintahan secara eksplisit. Yang kemudian pemikiran tersebut dikaji oleh Robert Mac Iver dalam bukunya *The Web of Government* di tahun 1947. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu baru yang muncul pada tahun 1970-an.

16 Taliziduhu Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara: Jakarta. Hal. 18-19.

Perbedaan lain terletak pada pengertian/definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Perbedaan tersebut terletak pada objek formasi kajian Ilmu Pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar-belakang ilmu masing-masing ahli. Perbedaan ini yang menyebabkan ketidak-jelasan tentang kedudukan dan posisi Ilmu Pemerintahan itu sendiri.

Jadi Ilmu Pemerintahan merupakan multiaspek dan multidisiplin. Tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lain. Kajian Ilmu Pemerintahan secara epistemologi, bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain dalam metodologinya. Secara aksiologi, Ilmu Pemerintahan mempunyai guna/manfaat dalam mengurus kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud seperti dalam hal aturan, fasilitas, dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan Negara. Jadi dapat dikatakan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah, karena memiliki metodologi/filsafat-ilmu dan memiliki guna/manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ilmu Pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Garna, Judistira K. 2010. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Primaco Akademika.
- Kencana S, Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Munasef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1983. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poelje, D.G.A. 1953. *Algemene inleiding tot de bestuurskunde*. Samson N.V.: Alphen aan den Rijn.
- Suryaningrat, Bayu, 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Van Ylst, Franciscus. 1998. *Hakekat Ilmu Pemerintahan*. (Tesis). Depok: UI.
- _____. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. (Disertasi). Depok: UI.